

MODERNISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN: SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS

Hadriana Marhaeni Munthe

Abstract: Approach modernize as an utilized development paradigm in formulating its development program and concepts of agriculture area in practice have generated various social problem. Among is the happening of change of social relation pattern of farmer, social difference among rich farmer and impecunious farmer progressively sharply and others. Taking lesson from various development case hence emerge other development alternative. Participative planning representing one solution which on the market to overcome weakness of previous development paradigm. As especial assumption from this approach of society priority as especial player in all development activity. If antecedent development strategy have the character of down top turned into up bottom.

Keywords: modernization, paradigm, development, participation

PENDAHULUAN

Hampir 80% atau lebih penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan yang bekerja pada sektor pertanian sebagai mata pencarian pokok, sehingga merupakan lapangan kerja dan produktif dan menyediakan pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat.

Kebijaksanaan pembangunan pertanian dalam tiga dekade terakhir berorientasi pada peningkatan produksi melalui penggunaan teknologi padat modal. Tujuan akhir yang diharapkan pemerintah adalah meningkatnya pangan dalam negeri melalui pencapaian swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pangan terhadap negara luar.

Untuk mencapai tujuan di atas, pelaksanaan pembangunan melalui progam progamnya dilaksanakan dengan penerapan kebijaksanaan menyeluruh yang direncanakan dan disusun secara *top down*. Daerah, dalam hal ini propinsi harus menyelesaikan kebijaksanaan pusat dengan kondisi wilayah setempat. Selain itu, untuk mempercepat pertumbuhan pertanian dilakukan pembangunan sub sektor dengan pendekatan yang berbeda tetapi sasaran sama. Tidak jarang unsur politis dan birokrasi turut bermain mewarnai pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian guna menyuksekkan progam-program nasional yang dilaksanakan di daerah. Konsepsi mengenai keberhasilan pencapaian kesejahteraan masyarakat diukur dari pertumbuhan ekonomi nasional (GNP), dengan mengandalkan terjadinya *trickle down effect*.

Kesejahteraan masyarakat yang diukur dari GNP merupakan anggapan yang keliru, karena dalam GNP kesejahteraan sosial belum tentu tercapai. Selain itu, kesejahteraan sosial tidak dapat disamakan dengan kesejahteraan ekonomi. Dengan mengutip pendapat pranadji (1999), bahwa komponen kesejahteraan sosial hanya dapat dicapai dengan perubahan struktur, keorganisasian, pertanian, dan budaya masyarakat pertanian setempat yang melatarbelakanginya. Di samping itu, penyehatan aspek sosio-budaya harus dipandang sebagai faktor penggerak utamanya.

Kebijakan pembangunan pertanian dengan pola *top down* dengan orientasi produksi melalui penggunaan teknologi modern yang sangat teknis mekanistik, telah menimbulkan masalah-masalah dan perubahan-perubahan, baik pemerintah daerah yang mengimplementasikan kebijaksanaan pusat maupun masyarakat petani sebagai obyek dari pembangunan. Masalah-masalah umum yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan pertanian antara lain:

1. Menumbuhkan ketergantungan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, sehingga sering tidak sesuai dengan kondisi wilayah dan sosial budaya masyarakat.
2. Menimbulkan ego sub sektoral dalam pelaksanaan progam-program pembangunan pertanian, karena lemahnya kordinasi dan integrasi antara sub sektor.
3. Merosotnya nilai-nilai tradisional dan norma-norma kekeluargaan yang saling membutuhkan dan ketergantungan yang hidup di pedesaan.

4. Melahirkan ketergantungan petani terhadap pemerintah dalam pembangunan, sebagai akibat pendekatan pelaksanaan program melalui bantuan subsidi.

Selain faktor-faktor eksternal, modernisasi pembangunan pertanian yang telah di uraikan di atas mengakibatkan perubahan sosial dalam masyarakat (dalam arti negatif). Tidak sedikit pula faktor-faktor internal yang ikut mempengaruhi proses pembangunan dan modernisasi pertanian. Koentjaraningrat (1985:37-49) menguraikan beberapa karakteristik mental manusia Indonesia yang merupakan penghambat pembangunan dan proses modernisasi, antara lain:

1. Pandangan terhadap sesama lebih didasarkan pada prinsip gotong royong lebih baik, tetapi apabila keberhasilan seseorang dianggap sombong atau meremehkan mutu, selain itu munculnya sikap konformisme.
2. Pandangan hidup yang berorientasi pada waktu masa lalu.
3. Mentalitas yang suka menerbas, atau mentalitas mencari jalan pintas. Mentalitas muncul menerbas akibat dari mentalitas meremehkan mutu.
4. Tidak percaya pada diri sendiri, dan ;
5. Orientasi nilai budaya yang terlampau mementingkan konsep ketergantungan pada atasan atau kepada sesama manusia dalam melakukan segala sesuatu. Mentalitas seperti ini dapat menghilangkan dorongan inovatif dan kreatif manusia.

Mentalitas yang di uraikan oleh Koentjaraningrat tidak dapat begitu saja di terima sebagai sesuatu yang berlaku universal, melainkan sangat tergantung kepada setiap individu, kelompok komunitas dalam memahami diri terhadap orientasi masa depannya, serta tergantung pada kondisi wilayah dan sosial-budaya setempat. Pranadji (2000) mempunyai pandangan bahwa desentralisasi akan lebih membuka peluang berperannya pranata sosial setempat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan pertanian. Selain itu, desentralisasi akan lebih membuka peluang berperannya perantara keterampilan, kerjasama sosial dan kontrol sosial yang lebih baik terhadap proses transformasi pertanian secara berkelanjutan di wilayah setempat.

Modernisasi di bidang pertanian di Indonesia di tandai dengan perubahan yang mendasar pada pola-pola pertanian, dari cara-cara tradisional menjadi cara-cara yang lebih maju. Perubahan-perubahan tersebut meliputi beberapa hal, antara lain dalam pengelolaan tanah, penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk, penggunaan sarana-sarana produksi pertanian, dan pengaturan waktu panen. Pengenalan terhadap pola yang baru dilakukan dengan pembenahan terhadap kelembagaan-kelembagaan yang berkaitan dengan pertanian, seperti, kelompok Tani, KUD, PPL, Bank Perkreditan, P3A, dan sebagainya. Selanjutnya ditetapkan pola pengembangan dalam bentuk, usaha ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi.

Selama beberapa pelita, modernisasi pertanian telah membawa perubahan-perubahan yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan produksi pertanian yang mencapai puncak ketika tercapainya swasembada pangan. Namun kondisi ini tidak bertahan lama, dan pada akhirnya membawa kembali bidang pertanian di Indonesia dalam suasana keperhatian yang ditandai dengan menurunnya tingkat produksi, sehingga menjadikan Indonesia kembali sebagai pengimpor beras. Mengapa hal ini terjadi? Inilah permasalahan yang terjadi di Indonesia. Sebagai asumsi dasar, kondisi ini terbentuk melalui berbagai proses yang tidak dapat di lepaskan. *Pertama*, dari aspek modernisasi itu sendiri, dan *Kedua* berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial yang muncul dari modernisasi yang tidak diantisipasi secara dini.

Dalam bidang pertanian, perubahan-perubahan sosial petani akibat dari modernisasi adalah dengan diperkenalkannya mesin-mesin, seperti mesin penebar dan traktor tangan telah menghilangkan mata pencaharian penduduk yang selama ini mendapatkan upah dari menuai. Kemudian, pemakaian traktor tangan telah menggantikan tenaga kerbau, sehingga sebagian besar petani tidak lagi berternak kerbau. Untuk kasus ini, hasil penelitian Scott tentang petani di Sedaka, Malaysia, diuraikan dengan cermat bagaimana penggunaan teknologi itu telah merubah hubungan sosial di Malaysia. Scott memberikan contoh tentang digunakannya mesin pemanen dan perontok padi, kemudian pemilik tanah memutuskan hubungan dengan pekerja. Putusnya hubungan antara pemilik tanah dan para pekerja membuat perbedaan antara kelas kaya dan miskin semakin nyata. Mesin juga telah

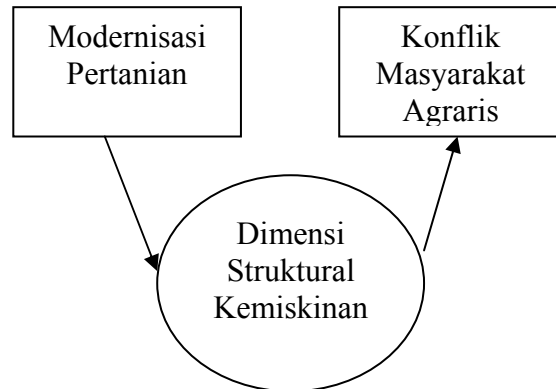
merubah orientasi para tuan tanah, dari anggapan usaha sebagai salah satu fungsi sosial menjadi kerja sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan (Scott, 2000: 202).

Penelitian Scott menunjukkan bahwa penggunaan teknologi pertanian mempunyai dampak terhadap perubahan struktur masyarakat, dan akhirnya berpengaruh terhadap pola-pola institusional masyarakat. Kondisi ini akan memperluas struktur kemiskinan. Sedangkan tujuan dari pembangunan pertanian itu sendiri pada dasarnya adalah untuk memperkecil struktur kemiskinan.

Menurut Soedjatmoko, struktur adalah pola-pola organisasi sosial yang mantap, luas, stabil, dan mampu untuk meneruskan diri (*self reproducing*). Suatu masyarakat yang melintasi semua sektor. Lebih lanjut, Soedjatmoko mengatakan bahwa institusi atau lembaga adalah suatu rangkaian hubungan antara manusia yang teratur dan disahkan secara sosial, yang menentukan hak dan kewajiban serta sifat hubungannya dengan orang lain. Lembaga-lembaga ini penting karena mereka menjamin kemantapan, kepastian, dan *prediktability* dalam interaksi sosial dan menentukan pola taat tertib masyarakat (Soedjatmoko, 1984: 157).

Sebelum di perkenalkannya mesin-mesin pertanian, struktur masyarakat petani sangat mendukung terciptanya kemantapan, kestabilan, dan kemampuan dalam menghubungkan dua fenomena ini. Maka, yang muncul kemudian dalam tatanan sosial masyarakat petani adalah suatu konflik masyarakat agraris. Tingkat kedua, bentuk perjuangan mengenai kepastian suatu defenisi terhadap keadilan suatu kasus tertentu, seperangkat faktor tertentu, dan sesuatu perilaku tertentu. Tingkat ketiga, pertarungan tentang tanah kerja, pendapatan, dan kekuasaan ditengah-tengah perubahan besar yang disebabkan oleh suatu revolusi pertanian (Scott, 2000: 36). Untuk hal ini Scott mengangkat suatu contoh bahwa orang kaya sepantasnya bersifat dermawan. Ini adalah suatu prinsip. Ketika prinsip ini dilanggar, maka mulailah konflik itu terjadi.

Apa yang ingin di ungkapkan oleh Scott dan Soedjatmoko seperti diuraikan di atas, sangat jelas memberikan suatu gambaran bahwa modernisasi pertanian melalui penggunaan mesin-mesin pertanian yang kemudian berkembang menjadi suatu konflik dalam masyarakat agraris. Sebagai ilustrasi, dapat dijelaskan dalam bentuk hubungan sebagai berikut:



PEMBAHASAN

Tinjauan Historis Pembangunan Pertanian

Berdasarkan sejarah, pembangunan pertanian telah mengalami beberapa tahap atau perkembangan. Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu zaman sebelum dan sesudah Bimas. Dari kedua zaman tersebut, banyak terjadi perubahan yang dapat dilihat dari aspek yang ditimbulkannya.

Pada masa sebelum Bimas, umumnya masyarakat belum mengenal jenis-jenis padi unggul, sehingga mereka masih menggunakan varietas lokal yang dicirikan dengan umur yang panjang dan produksi yang relatif rendah. Dalam usaha tani, secara umum masyarakat belum menggunakan teknologi yang modern (seperti pupuk, dan obat-obatan). Dalam menentukan jenis kegiatan termasuk jenis komoditi yang akan diusahakan, para petani masih mempunyai kebebasan atau dengan kata lain tidak ada intervensi dari pemerintah.

Pada era enam puluhan, pemerintah melalui suatu terobosan guna memacu peningkatan produksi, melaksanakan program Bimas dengan menerapkan beberapa teknologi dalam usaha pertanian yang berlanjut hingga saat ini. Dalam program ini, sudah terlihat adanya suatu bentuk intervensi dari pemerintah dalam pengaturan terhadap kegiatan petani sehingga petani tidak bebas dalam menentukan jenis usaha komoditi yang dilaksanakannya.

Pembangunan dengan cara penerapan teknologi yang dikenal dengan revolusi hijau, dimana penerapan teknologi sudah diperkenalkan kepada petani dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani ternyata tidak berhasil dan bahkan menimbulkan

perubahan sosial yang bersifat negatif pada masyarakat.

Modernisasi Pertanian dan Perubahan Sosial Masyarakat

Modernisasi pertanian adalah suatu perubahan pengelolaan usaha tani dari tradisional ke pertanian yang lebih maju dengan penggunaan teknologi-teknologi baru. Modernisasi dapat diartikan sebagai transformasi yaitu perubahan. Dalam arti yang lebih luas transformasi tidak hanya mencakup perubahan yang terjadi pada bentuk luar, namun pada hakekatnya meliputi bentuk dasar, fungsi, struktur, atau karakteristik suatu kegiatan usaha ekonomi masyarakat (Pranadji, 2000).

Modernisasi dapat diartikan sebagai bentuk, ciri, struktur dan kemampuan sistem kegiatan agribisnis dalam menggairahkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan menyehatkan perekonomian masyarakat pelakunya. Dumomt dalam Pranadji (2000) mengatakan bahwa transformasi atau usaha pertanian dapat disejajarkan dengan transformasi pedesaan. Dipandang dari aspek sosio budaya, transformasi pertanian identik dengan proses modernisasi dan pembangunan masyarakat pertanian di pedesaan. Sayagyo (1985: 10) mengartikan modernisasi suatu masyarakat adalah suatu proses transformasi, yaitu suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya.

Perubahan sosial adalah terjadinya perbedaan dalam aspek kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu (Rusidi, 2000). Aspek-aspek kehidupan masyarakat itu telah disistematisasikan pada struktur proses sosial. Dimana perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada struktur (kebudayaan dan kelembagaan) pada pola proses sosial.

Menurut Parson, dinamika masyarakat berhubungan dengan perubahan masyarakat. Kemudian, terdapat beberapa unsur yang berinteraksi satu sama lain. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Orientasi manusia terhadap situasi yang melibatkan orang lain.
2. Pelaku yang mengadakan kegiatan dalam masyarakat.
3. Kegiatan sebagai hasil orientasi dan pengolahan pemikiran pelaku tentang bagaimana mencapai cita-cita.

4. Lambang dan sistem perlambangan yang mewujudkan komunikasi dalam mencapai tujuan. Sehubungan dengan itu sistem sosial merupakan hasil individu, yang terjadi dalam lingkungan fisik dan sosial.

Strategi Pembangunan Pertanian

Pengalaman menunjukkan, bahwa secara umum pembangunan masyarakat desa yang dilakukan di desa melalui sektoral mempunyai strategi atau pendekatan yang berbeda-beda. Demikian pula pembangunan dalam sektor pertanian melakukan hal yang sama yaitu pendekatan sub-sektoral. Nasikun dalam Leibo (1995: 97) mengatakan bahwa adanya berbagai strategi atau pendekatan organisasional pembangunan masyarakat desa barangkali merupakan indikasi yang paling jelas, oleh karena strategi-strategi tersebut terbukti telah berkembang lebih di atas dasar akumulasi pengertian keilmuan yang mantap.

Praktek-praktek pembangunan masyarakat pertanian di pedesaan yang kita kenal selama ini sangat hegemoni yang berparadigma tunggal, yaitu paradigma "struktural fungsional". Pembangunan masyarakat pertanian yang berparadigma tunggal menggunakan pendekatan teori demokrasi liberal barat, merupakan kesalahan fatal bila diterapkan di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya lokal, serta sistem sosial-politik dan demokrasi yang labil. Praktik pembangunan masyarakat pedesaan yang berparadigma tunggal, bukan tidak mungkin telah melahirkan ketergantungan-ketergantungan masyarakat pedesaan seperti pemberian bantuan modal petani, baik yang berupa kredit dan subsidi maupun bantuan hibah. Berdasarkan pengalaman proyek-proyek pembangunan berupa kredit dan subsidi maupun bantuan hibah, proyek-proyek pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat seperti proyek pengembangan perkebunan rakyat, perluasan areal tanam dan lain-lain memberikan hibah untuk tahun pertama, lalu kemudian pada tahun-tahun berikutnya bantuan diberikan dalam bentuk kredit. Merupakan suatu anggapan keliru bila bentuk bantuan tersebut diartikan sebagai suatu pemberdayaan masyarakat petani.

Perumusan strategi atau pendekatan pembangunan masyarakat yang direncanakan tidak hanya diturunkan dari orientasi-orientasi filosofikal yang menjadi landasannya, akan tetapi

juga berdasarkan pengalaman empirik (Nasikun dalam Leibo, 1995). Perumusan strategi dengan landasan filosofikal dan pengalaman empirik itupun belum menjamin keberhasilannya, apabila bukan merupakan perencanaan partisipatif (*participatory planning*). Strategi-strategi pembangunan pertanian (masyarakat pedesaan) yang dilakukan selama ini hanya sebatas menganjurkan strategi perubahan masyarakat berdasarkan partisipasi luas, akan tetapi tidak pernah dilakukan, meskipun pendekatan pembangunan masyarakat adalah gotong royong. Partisipasi luas yang digalakkan tersebut tidak jarang disertai dengan pemaksaan “halus” (Koentjaraningrat, 1985: 97-105) membedakan partisipasi dalam bentuk aktifitas-aktifitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus; kedua partisipasi individu diluar aktivitas bersama dalam pembangunan.

Kedua tipe partisipasi yang digambarkan oleh Koentjaraningrat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dimana program pembangunan atau proyek yang telah direncanakan di tingkat pusat tanpa melibatkan masyarakat mulai dari diagnosis masalah dan potensi sumber daya, perencanaan program dan pelaksanaan. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa perumusan strategi pembangunan dalam rangka otonomi daerah harus sarat dengan partisipasi. Partisipasi yang dimaksudkan berbeda dengan yang diuraikan Koentjaraningrat, yaitu melibatkan masyarakat desa secara luas dalam pengambilan keputusan-keputusan, mulai dari diagnosis masalah, identifikasi potensi sumber daya, perencanaan program dan penentuan program yang diusulkan hingga ke tingkat daerah, dan sampai pada pelaksanaan program pembangunan serta pengawasan dan evaluasi.

Namun demikian, pemerintah tetap sebagai kontrol sehingga perencanaan pembangunan yang *bottom-up* tidak melenceng dari tujuan pembangunan. Pembangunan masyarakat yang direncanakan dari bawah harus menyentuh seluruh masyarakat, dan bukan untuk golongan tertentu. Untuk mengatasi adanya perbedaan-perbedaan, maka perlu dibentuk suatu institusi atau lembaga yang terintegrasi secara normatif pada kondisi yang kompleks secara keseluruhan di berbagai tingkat pelayanan dalam suatu sistem pemerintahan (Parsons, 1964: 76).

Nasikun dalam Leibo (1995) mengklasifikasikan strategi-strategi organisasional

pembangunan masyarakat desa menjadi empat strategi yang berlandaskan pendekatan teoritis, yaitu:

1. Strategi pembangunan gotong royong
2. Strategi teknikal profesional.
3. Strategi konflik, dan
4. Strategi pembelotan kultural.

Strategi pembangunan gotong royong asumsi dasarnya adalah paradigma struktural fungsional, dimana strategi ini melibatkan masyarakat sebagai suatu “sistem sosial” yang terdiri atas bagian-bagian terintegrasi secara normatif, dimana tiap-tiap bagian memberikan sumbangan fungsional masing-masingnya bagi pencapaian tujuan masyarakat secara keseluruhan. Demikian pula strategi pembangunan teknikal profesional, bahwa asumsi-asumsi yang melandasi strategi ini tidak berbeda dengan asumsi yang mendasari strategi pembangunan gotong royong. Strategi pembangunan teknikal profesional memandang masyarakat sebagai suatu sistem hubungan sosial yang semakin kompleks, dengan struktur-struktur serta proses-proses kemasyarakatan yang semakin modern.

Telah diuraikan di atas bahwa pembangunan suatu pertanian juga diwarnai oleh ego sub sektoral, lemahnya koordinasi, dan integrasi antar sub-sektoral serta konsep pemberdayaan masyarakat yang berbeda turut mempengaruhi pola pendekatan pembangunan masyarakat yang digunakan. Berdasarkan fenomena tersebut, sesuai dengan pendapat Nasikun (Leibo, 1995: 111) mengenai perlunya suatu strategi pembangunan berparadigma ganda, yaitu suatu integrasi atau sintesis dari berbagai strategi pembangunan. Strategi yang diusulkan ini secara teoritik sangat realistis, namun yang dilupakan Nasikun bahwa di Indonesia terdapat pola tani yang heterogen, kondisi agroekologi dan agroklimat, kondisi sosial budaya, dan kearifan lokal yang beraneka ragam.

Dalam rangka pemberlakuan otonomi daerah, maka terjadi pergeseran paradigma kebijaksanaan dan manajemen pembangunan sektoral serta penerapannya. Untuk sektor pertanian, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom di bidang pertanian, yang meliputi aspek-aspek kebijakan non teknis kelembagaan dalam

pelaksanaannya berikut hirarki yang memiliki wewenang untuk mengimplementasikan.

Menurut Suradisastra (2000) dalam implementasi otonomi daerah sesuai dengan penerapan PP No 25/2000, pada sektor pertanian akan terjadi perubahan paradigma yang salah satunya adalah sentralisasi, akan berubah menjadi desentralisasi dalam konteks pengelolaan wilayah, keuangan, dan proses pengambilan keputusan. Pola pikir dan manajemen berorientasi pusat akan bergeser menjadi pola pikir dan manajemen pengambilan keputusan yang bersifat spesifik wilayah, baik secara teknis dan ekonomis maupun secara sosiokultural, sehingga proses pengambilan keputusan akan melibatkan seluruh komponen pembangunan termasuk masyarakat adat. Melibatkan masyarakat adat yang berperan dalam pengolahan sumber daya pertanian tradisional, mampu menghindarkan timbulnya *rural exodus syndrome*.

Strategi pembangunan berparadigma ganda yang diusulkan Nasikun sangat sesuai untuk diterapkan dalam perumusan strategi pembangunan masyarakat desa. Namun demikian strategi tersebut masih perlu disintesiskan lagi berdasarkan keragaman sosial budaya masyarakat setempat. Seluruh komponen pembangunan dituntut untuk mengembangkan suatu sistem komunikasi yang terbuka sehingga dapat

menghindari berkembangnya berbagai kelompok dan kepentingan.

Pergeseran paradigma pembangunan sektoral dan kemungkinan dampak dari implementasi PP 25/2000, serta penerapan strategi pembangunan berparadigma ganda terhadap pembangunan daerah otonom, tentu akan menimbulkan perbedaan persepsi atas misi dan visi pembangunan masyarakat pertanian di pedesaan sehingga diperlukan antisipasi sejak dini.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak aplikasi strategi pembangunan yang direncanakan dari bawah, perlu dibentuk suatu badan perwakilan desa sesuai dengan pasal 104 UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang anggotanya terdiri dari berbagai komponen masyarakat, termasuk masyarakat adat, kelompok kepentingan, dan aparat pemerintah. Badan Perwakilan Desa ini berfungsi penggerak integrasi dari berbagai komponen masyarakat, mengayomi masyarakat adat, membuat peraturan desa, menampung, dan menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan, ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah desa, serta mengajukan pertimbangan-pertimbangan lain kepada pemerintah daerah kepada tingkat yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Leibo, J. *Sosiologi Pedesaan: Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Parson, Talcott. *A Function Theory of Change*. Dalam Eva Etzioni H dan Amitai Etzioni (eds.), *Social Change; Surces, Patterns and Consequences*. New York: Basic Book Inc.
- Pranadji, T. 1999. *Dinamika Inovasi Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pertanian 2*. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.
- Pranadji, T. 2000. *Desentralisasi dan Pemberdayaan Sosio Budaya Setempat untuk Peningkatan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*. Makalah disampaikan dalam Pelatihan Pemahaman Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat dalam Perencanaan dan Penerapan Teknologi, Bandung, 28 Februari - 30 April 2000.
- Pranadji, T. 2000. *Pendekatan Sosio-Budaya dalam Transformasi (pembangunan)*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2001 ke Depan; Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor, 9 - 10 September 2000.
- Rusidi, H. 2000. *Sosiologi Pedesaan Dalam Pemahaman Aspek Sosial Budaya Masyarakat Bagi Perencanaan dan Penerapan Teknologi*. Makalah disampaikan dalam Pelatihan Pemahaman Aspek Sosial Budaya Masyarakat dalam Perencanaan dan Penerapan Teknologi, Bandung, 28 Februari - 30 April 2000.
- Scoot, James, C. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soedjatmoko. 2000. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan; Pilihan Karangan*. Jakarta: LP3ES.
- Suradisastira, K. 2000. *Implikasi PP No. 25/2000 Terhadap Manajemen Pembangunan Pertanian*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2001, Bogor, 9 - 10 Nopember 2000.